



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIANTO
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
3. NHK : 453039

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 582.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 426.000.000
2. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 156.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 27.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000
2. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, VIAR VIQ A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 12.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 650.000.000

III. HUTANG Rp. 17.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 632.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SUPRIANTO
NIK : 3275040303670015
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA BEKASI
Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 2 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan:

(021) 1500200 

informasi@pajak.go.id 

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-
41134/CT/KPP.3302/2026**

Tanggal : 25 Februari 2026

NPWP : 3275040303670015

Nama Wajib Pajak : SUPRIANTO

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima SPT : 25 Februari 2026